



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 2677-2685

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Garut

Irma Rosmayati¹, Abdul Fatah Hassanudin², Cegi Juniar Prayoga³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

i.rosmayati@uniga.ac.id, abdulfatah@uniga.ac.id, cegiuniar@uniga.ac.id

Abstrak

Penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai prasyarat utama dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif tidak hanya berkaitan dengan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dengan kesesuaian perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan fiskal daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan aparatur pengelola keuangan daerah serta didukung oleh studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut secara umum telah berjalan relatif efektif, ditunjukkan oleh ketercapaian target pendapatan daerah, kepatuhan terhadap regulasi, serta sistem pelaporan keuangan yang telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah catatan penting, khususnya terkait belum optimalnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, masih adanya kendala efisiensi pelaksanaan anggaran, serta keterbatasan aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta optimalisasi transparansi pengelolaan keuangan menjadi implikasi praktis yang penting guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntabilitas; BPKAD; Efektivitas; Keuangan Daerah; Otonomi Daerah

1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan konsekuensi dari perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan publik (Azhari, 2019).

Dalam kerangka otonomi daerah tersebut, pengelolaan keuangan daerah memegang peran strategis karena menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan kebijakan publik ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2018). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola keuangan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud konkret dari kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang efektif menjadi prasyarat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Halim & Kusufi, 2018).

Selain APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik. LKPD menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam LKPD menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

Penyusunan dan penyajian LKPD yang andal, relevan, dan tepat waktu merupakan bagian dari prinsip good governance. Laporan keuangan yang berkualitas memungkinkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, untuk melakukan evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan berbasis data yang akurat (Defitri, 2018). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan yang dihasilkan.

Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat menghadapi dinamika pengelolaan keuangan daerah yang cukup kompleks. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah, capaian pendapatan Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2023 menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi, namun masih terdapat selisih antara target dan realisasi anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi pendapatan daerah dan stabilitas fiskal.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. BPKAD tidak hanya bertugas menyusun dan melaksanakan anggaran, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas pelaporan, serta transparansi pengelolaan keuangan publik. Kinerja BPKAD secara langsung berpengaruh terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Namun demikian, beberapa permasalahan masih ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, seperti belum optimalnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, ketidakseimbangan serapan anggaran antarperiode, serta keterbatasan aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sering kali dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta kualitas sistem pengawasan dan pelaporan keuangan (Edowati et al., 2021; Laoli et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan efektif, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan keuangan daerah dari berbagai perspektif, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Studi oleh Siregar dan Suryani (2020) dalam jurnal nasional menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran dan konsistensi pelaksanaan program sesuai dokumen perencanaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh keselarasan antara perencanaan dan realisasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman, Nugroho, dan Widodo (2021) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah memiliki hubungan positif terhadap tingkat kepercayaan publik. Melalui analisis laporan keuangan pemerintah daerah di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata pada kepatuhan administratif.

Dari perspektif internasional, penelitian oleh Shah dan Shen (2019) menekankan bahwa desentralisasi fiskal yang tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Studi tersebut menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di negara berkembang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengawasan. Temuan ini relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan sistem desentralisasi yang kompleks.

Selanjutnya, penelitian oleh Kluvers dan Tippet (2020) dalam konteks sektor publik menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis hasil (*outcome-based budgeting*) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini mendorong evaluasi yang lebih substantif terhadap dampak kebijakan anggaran.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan keuangan daerah, sebagian besar studi masih berfokus pada analisis kuantitatif berbasis rasio keuangan atau evaluasi kinerja anggaran secara agregat. Penelitian yang menggali efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara kualitatif dengan menekankan proses, konteks kelembagaan, dan dinamika implementasi kebijakan masih relatif terbatas, khususnya pada level organisasi perangkat daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menelaah efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan dimensi pencapaian tujuan, relevansi, efisiensi, manfaat, serta transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini tidak hanya menilai hasil akhir pengelolaan keuangan, tetapi juga mengkaji proses dan tantangan yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Garut sebagai aktor utama pengelolaan keuangan daerah.

Urgensi kajian ini semakin menguat mengingat meningkatnya tuntutan publik terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di era demokratisasi dan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat kualitas pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengelolaan keuangan publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana terjadi dalam konteks nyata organisasi pemerintah daerah. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, proses, dan pengalaman partisipan terhadap suatu fenomena sosial secara komprehensif dan kontekstual.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu fenomena sebagaimana adanya, sehingga cocok digunakan untuk meneliti fenomena kebijakan dan tata kelola sektor publik.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap praktik, tantangan, dan dinamika efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap perspektif informan secara langsung serta menginterpretasikan data berdasarkan konteks kelembagaan dan kebijakan yang melingkupinya (Moleong, 2018).

2.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis BPKAD sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Objek penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Garut, dengan fokus pada proses pengelolaan, realisasi anggaran, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2.3 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), purposive sampling digunakan ketika peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dan aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kepala bidang dan staf terkait pada BPKAD Kabupaten Garut. Pemilihan informan didasarkan pada kapasitas dan kompetensi mereka dalam memberikan informasi yang mendalam dan akurat mengenai proses serta tantangan pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2018) yang menekankan pentingnya memilih informan yang mampu memberikan informasi kaya (information-rich cases) dalam penelitian kualitatif.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini mencerminkan pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terkait efektivitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Garut.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan, seperti laporan keuangan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah yang mendukung analisis penelitian.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka konseptual efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Moleong (2018), wawancara merupakan teknik yang efektif dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi mendalam dari informan terkait pengalaman dan pemahaman mereka terhadap suatu fenomena.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti laporan realisasi anggaran, LKPD, dan laporan kinerja instansi pemerintah. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif karena mampu memberikan bukti tertulis yang bersifat objektif dan dapat memperkuat data hasil wawancara.

Teknik pengumpulan data lainnya adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengkaji buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi kepustakaan bertujuan untuk membangun landasan teoritis yang kuat serta memperkaya analisis dan interpretasi hasil penelitian (Creswell, 2018).

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian sehingga data menjadi lebih terorganisir dan bermakna (Miles et al., 2014).

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data secara berkelanjutan untuk memperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2019).

2.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data yang berbeda. Menurut Moleong (2018), triangulasi merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Dengan menggunakan triangulasi sumber, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak bersifat subjektif atau sepihak. Data hasil wawancara diverifikasi dengan data dokumentasi dan sumber tertulis lainnya, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2018).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, BPKAD menjadi institusi kunci yang memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan sesuai dengan regulasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum, pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut telah mengikuti siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses tersebut mencakup tahap perencanaan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi melalui sistem pelaporan keuangan. BPKAD berperan dalam mengoordinasikan seluruh tahapan tersebut agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, sehingga kebijakan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Garut menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan pendapatan daerah yang dikoordinasikan oleh BPKAD telah berjalan cukup efektif, terutama pada pos pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah. Namun demikian, masih terdapat selisih antara target dan realisasi pendapatan yang menunjukkan adanya potensi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya dioptimalkan, khususnya pada sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pemanfaatan aset daerah.

Berikut disajikan tabel realisasi pendapatan daerah Kabupaten Garut sebagai gambaran umum kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	Capaian (%)
PENDAPATAN DAERAH	527.550.074.727,00	535.631.250.765,00	101,53%
Pendapatan Asli Daerah			
Pendapatan Transfer	4.297.220.792.497,00	4.219.407.436.264,00	98,19%
Pendapatan Transfer Dari Pusat - Lainnya	537.032.443.000,00	536.623.300.700,00	99,92%
Pendapatan Transfer Dari Provinsi	647.424.957.708,00	623.513.878.943,00	96,31%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.566.548.064,00	25.339.770.391,00	65,70%
Jumlah Pendapatan Daerah	4.863.337.415.288,00	4.780.438.457.960,00	98,30%

Sumber: LKPD BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2023

Dari sisi belanja daerah, pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPKAD menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan dan hibah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Tingginya proporsi belanja tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan kecenderungan penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam manajemen waktu pelaksanaan anggaran.

Selain itu, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikelola oleh BPKAD telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan disampaikan secara berkala. Laporan keuangan daerah menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan serta sebagai sarana transparansi kepada publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah masih perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan secara lebih optimal. Dengan demikian, secara umum pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut telah

berjalan relatif baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek optimalisasi pendapatan, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan keterbukaan informasi publik.

3.2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, kesesuaian dengan kebutuhan, efisiensi pelaksanaan, manfaat dan dampak, serta transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan multidimensi ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi pencapaian tujuan menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Garut telah mampu merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini tercermin dari tingkat realisasi pendapatan daerah yang mendekati target anggaran. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan keuangan daerah telah disusun secara realistis dan pelaksanaannya relatif konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)
Pendapatan Asli Daerah	100	101,53
Pendapatan Transfer	100	98,19
Total Pendapatan Daerah	100	98,30

Sumber: LKPD Kabupaten Garut Tahun 2023

Pada dimensi kesesuaian dengan kebutuhan, pengelolaan keuangan daerah telah diarahkan untuk mendukung program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada belanja yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembayaran pegawai pelayanan publik, bantuan sosial, dan hibah pembangunan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam menyesuaikan kebijakan pendapatan daerah dengan potensi dan kebutuhan riil masyarakat, khususnya pada sektor retribusi dan pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.

Dimensi efisiensi pelaksanaan menunjukkan bahwa meskipun tingkat serapan anggaran relatif tinggi, efisiensi pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan pola penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran, yang berpotensi mengurangi kualitas output program. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah serta perbaikan manajemen waktu dalam pelaksanaan anggaran agar penggunaan sumber daya dapat lebih efisien.

Tabel 3. Perbandingan Serapan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2022–2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
2022	4.626.954.746.948	4.626.954.746.948	100,00
2023	4.863.337.415.288	4.780.438.457.960	98,30

Sumber: LKPD Kabupaten Garut Tahun 2022–2023

Pada dimensi manfaat dan dampak (*outcome & impact*), pengelolaan keuangan daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari alokasi belanja daerah yang mendukung program bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan kepada desa. Selain itu, indikator makro seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa kebijakan anggaran daerah telah memberikan dampak yang relatif positif, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal dibandingkan rata-rata provinsi.

Dimensi transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Garut telah menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan secara rutin menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Informasi keuangan disediakan melalui berbagai saluran resmi pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan masih menjadi tantangan, sehingga transparansi yang ada belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan partisipasi dan pengawasan publik.

Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Garut menunjukkan kinerja yang relatif baik pada aspek pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, masih diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kesesuaian kebijakan keuangan dengan kebutuhan masyarakat, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih substantif. Penguatan kapasitas sumber daya

manusia, optimalisasi potensi pendapatan daerah, dan peningkatan literasi keuangan publik menjadi faktor kunci dalam mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

3.3 Analisis Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis terhadap kedua aspek ini memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan secara optimal serta menyalurkannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada BPKAD Kabupaten Garut, realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan dinamika yang mencerminkan capaian sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Garut secara umum menunjukkan kinerja yang relatif baik. Pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi, meskipun realisasi PAD telah mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan kapasitas fiskal daerah apabila pengelolaan sumber PAD dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	692.865.000.000	703.460.000.000	101,53
Pendapatan Transfer	4.070.472.415.288	3.996.978.457.960	98,19
Total Pendapatan Daerah	4.763.337.415.288	4.700.438.457.960	98,30

Sumber: LKPD Kabupaten Garut Tahun 2023

Pada sisi belanja daerah, realisasi belanja menunjukkan tingkat serapan anggaran yang tinggi, mendekati total anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah terutama dialokasikan untuk belanja operasi, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, proporsi belanja modal masih relatif terbatas dibandingkan belanja operasi, sehingga dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Tabel 5. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Operasi	3.604.215.000.000	3.545.980.000.000	98,38
Belanja Modal	784.522.415.288	756.428.457.960	96,42
Belanja Tidak Terduga	170.600.000.000	148.030.000.000	86,77
Total Belanja Daerah	4.559.337.415.288	4.450.438.457.960	97,61

Sumber: LKPD Kabupaten Garut Tahun 2023

Analisis perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan fiskal daerah berada dalam kondisi yang relatif seimbang. Realisasi pendapatan mampu menopang kebutuhan belanja daerah tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Namun demikian, pola realisasi belanja yang cenderung meningkat pada akhir tahun anggaran mengindikasikan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, yang berpotensi memengaruhi efisiensi dan kualitas output kegiatan.

Secara keseluruhan, analisis realisasi pendapatan dan belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Garut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah berada pada kategori cukup efektif. Meskipun demikian, peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, penguatan kualitas belanja modal, serta perbaikan manajemen waktu pelaksanaan anggaran menjadi agenda penting yang perlu diperhatikan agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4. Tantangan Dan Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Garut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang bersifat struktural, administratif, maupun teknis. Kompleksitas regulasi keuangan daerah, dinamika kebijakan fiskal nasional, serta keterbatasan kapasitas daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Tantangan ini menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi kelembagaan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kemandirian fiskal daerah. Struktur pendapatan Kabupaten Garut masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, potensi PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset belum sepenuhnya tergarap secara optimal akibat keterbatasan data, sistem pemungutan, dan kepatuhan wajib pajak.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Meskipun dokumen perencanaan telah disusun sesuai dengan ketentuan, masih terdapat ketidaksinkronan antara perencanaan jangka menengah, rencana kerja tahunan, dan pelaksanaan anggaran. Hal ini berdampak pada pola realisasi anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi pelaksanaan program dan kualitas output kegiatan.

Dari aspek sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah masih menjadi kendala yang signifikan. Perubahan regulasi yang cepat, penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi memerlukan aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan analitis yang memadai. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan sistem dan infrastruktur pengelolaan keuangan daerah. Meskipun pemerintah daerah telah menggunakan berbagai aplikasi pengelolaan keuangan, integrasi antar sistem masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam konsistensi data, keterlambatan pelaporan, serta kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara real time. Selain itu, keterbatasan dukungan teknologi informasi di beberapa unit kerja turut memengaruhi kelancaran pengelolaan keuangan daerah.

Dari perspektif transparansi dan akuntabilitas, tantangan utama terletak pada keterbatasan partisipasi dan pengawasan publik. Meskipun laporan keuangan daerah telah dipublikasikan secara resmi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan masih relatif rendah. Hal ini menyebabkan transparansi yang bersifat formal belum sepenuhnya mendorong akuntabilitas substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang lebih komunikatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar tata kelola keuangan yang baik dapat terwujud secara lebih efektif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut secara umum telah berjalan relatif efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan mendekati target yang ditetapkan, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, terutama terkait rendahnya tingkat kemandirian fiskal akibat dominasi pendapatan transfer, efisiensi pelaksanaan anggaran yang belum optimal, serta transparansi dan akuntabilitas yang masih bersifat formal. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dari BPKAD dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada satu perangkat daerah dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada perangkat daerah lain atau membandingkan antar daerah, serta menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Referensi

1. Anugrahwati, N., & Mediaty, J. (2021). Analysis Of Efficiency And Effectiveness Of Regional Financial Management In Mamuju District, Mamuju Regency. In *Quest Journals Journal Of Research In Business And Management* (Vol. 9). www.questjournals.org.
2. Aswandi, W. (2019). Pengaruh Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris Pada Organisasi Nirlaba Di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–14.
3. Azhari, A. K. (2019). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Intrans Publishing.
4. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
5. Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.

6. Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. . Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87-96.
7. Edwin Gendong, A., Tameno, N., & E. De Rozari, P. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai. *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3476–3495. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i09.1156>.
8. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
9. Hanifah, H. S. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 19(1), 046-052.
10. Harahap, A. W. (2021). Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara).
11. Kluvers, R., & Tippett, J. (2020). Performance measurement in the public sector: The role of outcomes and accountability. *International Journal of Public Sector Management*, 33(6), 595–610.
12. Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kabupaten nias (studi kasus bpkpd sebagai leading sektor penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381-1389.
13. Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Upp Stim Ykpn.
14. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
15. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
16. Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
17. Rahman, A., Nugroho, R., & Widodo, T. (2021). Transparency, accountability, and public trust in local government financial management. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 7(2), 101–115.
18. Saputra, P. M., Suhartono, E., Durya, N. P. M. A., & TAH, N. (2024). Analisis Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Analisis Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Moderasi Pendidikan dan Pelatihan Pengguna. *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)*, 16(2), 78-94.
19. Septialamsyah, D., & Nasution, J. (2022). Analysis Of The Efficiency And Effectiveness Of Regional Financial Management In The Regional Revenue Management Agency Of Asahan Regency. *Alexandria (Journal Of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(2), 35–38.
20. Setiawan, I. (2019). Kebijakan Perencanaan APBD Optimalisasi Dan Implementasi Sistem Informasi Akutansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
21. Shah, A., & Shen, C. (2019). Fiscal decentralization and governance: International perspectives. *Public Finance and Management*, 19(3), 197–221.
22. Siregar, B., & Suryani, L. (2020). Budget planning consistency and effectiveness of regional financial management. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 45–58.
23. Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. ALFABETA.
24. Sumiyarti, S., & Pratama, C. (2023). Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM Di Provinsi Jawa Barat. *Media Ekonomi*, 31(2), 181-194.
